

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi keuangan (pemerintah) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan negara dan daerah.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga UU tersebut sering disebut dengan UU Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut, maka perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah, dapat diduga

terjadi. Hal ini disebabkan karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemda, (Halim, 2008).

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (propinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan, (Nasir, 2010: 2). Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian, 2006: 278). Salah satu visi dan tujuan organisasi pemerintah adalah Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai tolak ukur kinerja, tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan, (Hadi, 2012).

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerahnya sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang terbentuk untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dana yang digunakan dalam organisasi ini adalah berasal dari dana publik, untuk itu pemerintah tidak hanya berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja tetapi juga kepada masyarakat luas, karena itu diperlukan sistem pengukuran kinerja untuk menilai suatu strategi, (Hamzah, 2008).

Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja dilakukan untuk menanggapi TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 28 tahun 1999 tentang hal yang sama. Menanggapi mandat tersebut maka dikeluarkan Inpres No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya sebagai wujud akuntabilitas, (Nasir, 2010: 1).

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. Sistem informasi yang didukung TI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi

dari karyawan suatu organisasi. Dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer.

Seperti yang diungkapkan oleh Sutabri (2004: 6) organisasi tergantung pada sistem informasi untuk mempertahankan kemampuan berkompetisi. Informasi pada dasarnya adalah sumber daya seperti halnya pabrik dan peralatan. Produktivitas kinerja suatu organisasi sebagai suatu hal yang penting agar tetap kompetitif, dapat ditingkatkan melalui sistem informasi yang lebih baik. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu badan usaha kepada beragam orang. Salah satu teknologi informasi yang digunakan sebagai pengolahan data bagi setiap organisasi pemerintah maupun swasta adalah sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi.

Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh SIA merupakan bagian yang terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi akuntansi terutama berhubungan dengan data keuangan dari suatu organisasi. Agar data keuangan yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen organisasi maupun pihak diluar organisasi, maka data tersebut perlu disusun dalam bentuk bentuk yang sesuai. Oleh karena itu sistem informasi akuntansi sangat diperlukan untuk mengatur arus dan

pengelolaan data akuntansi dalam perusahaan untuk dapat menghasilkan informasi yang sesuai dan dalam bentuk yang sesuai juga, (Sutabri, 2004: 1).

Sistem informasi akuntansi ini dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan sistem informasi akuntansi yang layak dapat dihasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam pemerintahan sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh *Good Government Governance*. Hal ini dalam mengelola keuangan rumah tangganya sendiri, pemerintah harus mampu melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Sebuah sistem informasi akuntansi yang layak merupakan syarat utama suatu pengelolaan keuangan yang baik, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap organisasi, (Nasir, 2010: 3).

Oleh karena itu, sangat penting dalam suatu pemerintahan mempunyai sistem informasi akuntansi yang mengedepankan orang-orang, prosedur, data, software dan infrastruktur teknologi informasi yang nantinya akan menghasilkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam dunia pemerintahan. Dengan sistem informasi akuntansi diharapkan semuanya akan berjalan

terstruktur dan sesuai dengan prosedur/ pedoman yang berlaku yang menggambarkan tahapan dalam proses, sehingga akan dihasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan penjelasan di atas penerapan sistem informasi akuntansi sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah itu sendiri terutama terkait dengan kinerja keuangan pemerintah tersebut. Seperti halnya penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fawzi (2011) Pengaruh pengawasan intern dan Sistem informasi akuntansi terhadap Kinerja pemerintahan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya). Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya. Apabila sistem informasi yang dikelola telah baik, maka kualitasnya pun akan baik. Karena salah satu kriteria sistem informasi akuntansi yang baik adalah menghasilkan informasi yang berkualitas. Oleh karena itu pemerintah perlu memiliki sistem informasi akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem informasi akuntansi tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja, (Fawzi, 2011).

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merupakan salah penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan dibidang kesehatan Provinsi Gorontalo. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan/kinerja keuangannya masih belum maksimal khususnya dalam pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), BOK merupakan bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintah Kabupaten/Kota guna meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan percepatan pencapaian target Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Millenium Development Goals (MDGs) maupun penyerapan dana yang semakin tinggi. Namun demikian masih banyak kendala yang dihadapi, baik yang bersifat teknis, program maupun dalam hal pengelolaan keuangannya (<http://dinkes.gorontalo.web.id/>). Masalah lain yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yaitu pelaksanaan transparansi informasi akuntansi dalam program kesehatan terutama pengelolaan keuangan Jamkesta masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul Pengaruh Sistem Informasi akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

1.2 Identifikasi Maslah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan/pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terkait dengan pengelolaan dana BOK dimana pengelolaannya masih banyak kendala yang dihadapi, baik yang bersifat teknis, program maupun dalam hal pengelolaan keuangannya.
2. pelaksanaan transparansi informasi akuntansi dalam program kesehatan terutama pengelolaan keuangan Jamkesta masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan sistem informasi akuntansi dan kinerja keuangan. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan

bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah terutama pada Dinas Kesehatan provinsi Gorontalo khususnya dalam pengelolaan/kinerja keuangannya.

